

KELOMPOK KAJIAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA

**Muhammad Hanri,
Ph.D.**

hanri@lpem-feui.org

Nia Kurnia Sholihah, S.E.

nia.kurnia@lpem-
feui.org

DAFTAR ISI

Presidensi Indonesia di
G20 Tahun 2022 – 1

Pekerja Penyandang
Disabilitas di Indonesia –
3

RINGKASAN

Di tahun 2022 mendatang, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah dan Presidensi G20 yang merupakan forum negara-negara yang merupakan representasi ekonomi besar di dunia. Salah satu pembahasan yang diangkat dalam salah satu *working group* dalam G20 mendatang adalah isu mengenai kesempatan kerja bagi kelompok penyandang disabilitas. Momentum G20 ini dianggap sebagai wadah yang strategis untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik. Dengan perhatian kepada kelompok disabilitas, diharapkan hal ini akan membawa manfaat bagi peningkatan kontribusi kelompok disabilitas dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022

Sebagai forum yang mewadahi negara-negara di dunia yang menyumbang 80% dari PDB dunia, G20 merupakan forum internasional yang menjadi sorotan terutama terkait dengan beberapa isu mengenai ekonomi dan sosial. Negara-negara tersebut juga terlibat aktif dalam 75% perdagangan global serta mewakili 60% dari populasi dunia. Dengan anggota berjumlah 20 negara¹, G20 secara rutin menyelenggarakan pertemuan setiap tahunnya yang menjadi ajang dimana perwakilan dari negara antara lain Presiden/ Pemimpin Negara, Menteri Keuangan dan Kepala/ Gubernur Bank Sentral bertemu untuk mendiskusikan isu yang utamanya terkait dengan stabilitas keuangan global dan isu-isu sosial-ekonomi lainnya seperti pemberdayaan wanita, kesehatan, ketenagakerjaan, digitalisasi, dan migrasi².

Indonesia merupakan salah satu representasi negara berkembang dalam forum ini serta menjadi satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara. Hal ini tentunya membuat Indonesia memiliki peran yang strategis untuk menyuarakan kepentingan dan tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang, terutama di masa krisis misalnya pada masa pandemi yang diakibatkan wabah COVID-19. Indonesia semakin memiliki peluang untuk berperan aktif dalam mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi karena ditetapkan sebagai tuan rumah dan Presiden G20 pada tahun 2022 nanti. Penetapan ini dianggap

¹ Anggota G20 adalah Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, Jepang, India, Indonesia, Italia, Meksiko, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa

² Pertemuan G20 secara umum dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur keuangan (*finance track*) dan jalur non-keuangan (*Sherpa track*)

Salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022 nanti dalam aspek ketenagakerjaan adalah penciptaan pasar tenaga inklusif bagi penyandang disabilitas.

akan menjadi momentum yang baik bagi Indonesia untuk mempercepat pemulihan ekonomi dalam negeri maupun negara-negara anggota lainnya.

G20 memberikan wadah kepada negara-negara anggotanya mengenai *best practice* di negara masing-masing terkait isu tertentu, salah satunya adalah mengenai aspek ekonomi dan sosial ketenagakerjaan melalui Employment Working Group (EWG). EWG akan mengangkat isu seperti penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka pengangguran, penciptaan iklim kerja yang baik, serta isu mengenai pekerja muda setiap tahunnya. *Focal point* dari EWG adalah Kementerian Ketenagakerjaan atau yang terkait di masing-masing negara. Setiap tahunnya, isu yang diangkat beragam dan disesuaikan dengan agenda besar yang diusung pada tahun tersebut. Sebagai contoh pada tahun 2020 yang lalu, prioritas EWG adalah membahas isu mengenai transisi memasuki dunia kerja, transisi perlindungan sosial karena perubahan pola pekerjaan, serta pemanfaatan analisis perilaku untuk kebijakan tenaga kerja yang lebih baik.

Pada tahun 2022 nanti, melalui EWG, Indonesia mengangkat tema pemulihan aspek ketenagakerjaan di masa pandemic dengan tajuk *Improving the Employment Condition to Recover Together*. Secara khusus, ada empat isu prioritas yang akan diusulkan oleh Indonesia, yaitu: (1) penciptaan lapangan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia kerja; (2) pasar tenaga kerja inklusif dan kuota kerja bagi penyandang disabilitas; (3) pengembangan kapasitas manusia untuk pertumbuhan produktivitas berkelanjutan; serta (4) perlindungan tenaga kerja adaptif terhadap perubahan dunia kerja. Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022 nanti diharap akan memperkuat pasar tenaga kerja di Indonesia. Hal ini juga sehubungan dengan sektor tenaga kerja yang cukup terdampak adanya pandemi. Oleh karena itu, tantangan yang perlu dihadapi pada sektor ini diharapkan akan memberikan pengaruh yang positif dalam pemulihan perekonomian secara umum.

Lebih lanjut lagi, Indonesia secara khusus menekankan pentingnya pasar tenaga kerja inklusif bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu isu prioritas yang akan dibawa pemerintah melalui EWG. Dengan lebih dari 15% total populasi dunia yang memiliki disabilitas berdasarkan World Bank Report on Disability tahun 2011, kelompok masyarakat ini menjadi penting untuk mendapatkan perhatian khusus. Tantangan mengenai peningkatan keterampilan pekerja disabilitas, perluasan akses pasar tenaga kerja, serta perlindungan di tempat kerja perlu untuk didiskusikan perwujudannya dalam kebijakan yang akan dibahas dalam EWG. Diharapkan, perhatian pada isu ini akan menghasilkan kebijakan yang mampu mendorong peningkatan kesempatan kerja yang lebih luas, meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja, serta mendorong produktivitas bagi kelompok disabilitas. Dalam jangka panjang, hal ini juga diharapkan akan mampu meningkatkan peran dan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi.

Pekerja Penyandang Disabilitas di Indonesia

Berdasarkan SAKERNAS Agustus 2020, diketahui bahwa penduduk dengan usia 15 tahun ke atas (usia kerja) yang merupakan penyandang disabilitas adalah sebanyak 17,95 juta orang. Angka tersebut sama dengan sebanyak 8,8% dari total penduduk usia kerja di Indonesia. Sebanyak 45,32% di antaranya adalah laki-laki sedangkan 54,68% lainnya merupakan perempuan. Jumlah penduduk usia kerja yang mengalami disabilitas tersebut sedikit lebih banyak yang tinggal di perkotaan (50,56%) dibandingkan dengan yang tinggal di pedesaan (49,44%).

Sedangkan jika dilihat dari angkatan kerja, tercatat bahwa ada 8 juta orang yang merupakan penyandang disabilitas atau sama dengan 5,79% dari total angkatan kerja tahun 2020. Di kelompok ini, tercatat bahwa 57,83% di antaranya merupakan laki-laki, sedangkan 42,17% lainnya merupakan perempuan, serta lebih banyak yang tinggal di pedesaan (54,82%) dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan (45,18%). Angkatan kerja yang merupakan penyandang disabilitas paling banyak berasal dari kelompok usia produktif (25-59 tahun) yaitu sebesar 54,25% dibandingkan dengan kelompok lansia (60 tahun ke atas) yang tercatat sebanyak 43,32% dan kelompok usia muda (15-24 tahun) sebanyak 2,43%. Angkatan kerja penyandang disabilitas paling banyak hanya berpendidikan SD ke bawah (67,78%). Menurut lokasinya, sebagian besar angkatan kerja penyandang disabilitas merupakan penduduk Provinsi Jawa Barat (14,93%).

Lebih lanjut lagi, jumlah penyandang disabilitas yang tercatat bekerja adalah sebanyak 7,68 juta orang atau 5,98% dari total penduduk yang bekerja di Indonesia. Jumlah ini tercatat menurun sebesar 20,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, lebih banyak pekerja laki-laki (57,73%) dibandingkan dengan pekerja perempuan (42,27%) dan pekerja yang tinggal di pedesaan (55,74%) dibandingkan dengan yang di perkotaan (44,26%). Jika dilihat berdasarkan lapangan usaha atau sektor pekerjaannya, tercatat bahwa mayoritas pekerja penyandang disabilitas bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (47,9%), disusul kemudian sektor perdagangan besar dan eceran (16,02%), serta industri pengolahan (9,68%). Berdasarkan jabatannya, mayoritas merupakan pekerja terampil pertanian, kehutanan, dan perikanan (38,68%), usaha jasa dan tenaga penjualan (22,23), serta pekerja kasar (17,33%). Sedangkan berdasarkan status pekerjaan utamanya, paling banyak pekerja penyandang disabilitas berusaha sendiri (28,09%) atau dibantu buruh tidak tetap (26,36%).

Berdasarkan Siregar dkk (2021), angka pengangguran penduduk dengan disabilitas/ (*people with disability/* PWD) (3,99%) lebih rendah dibandingkan dengan penduduk bukan penyandang disabilitas (*people without disabilities/* PWOD) (7,26%). Meskipun demikian, rata-rata angka partisipasi tenaga kerja PWD lebih rendah (44,55%) dibandingkan dengan PWOD (70,01%) serta rata-rata upah yang diterima oleh PWD

Sebanyak 5,79% dari angkatan kerja Indonesia tahun 2020 adalah penyandang disabilitas. Mayoritas berlatar belakang pendidikan di bawah SD.

Angka pengangguran PWD (3,99%) lebih rendah dibandingkan dengan PWOD (7,26%).

lebih rendah (Rp 1,3 juta) dibandingkan dengan PWOD (1,8 juta). Selain itu, PWD yang bekerja di sektor formal juga tercatat lebih rendah (30,49%) dibandingkan dengan PWOD (48,27%). Rata-rata jumlah jam kerja pun juga lebih rendah oleh kelompok PWD dibandingkan dengan PWOD.

Pandemi COVID-19 tentu juga memberikan dampak kepada PWD. Secara umum, pandemi COVID-19 banyak mempengaruhi pekerja melalui pengurangan jam kerja. Selain itu, pengangguran dan perubahan pola pekerjaan terkait pandemi COVID-19 secara proporsional lebih mempengaruhi PWOD dibandingkan dengan PWD. Dalam hal kehilangan pekerjaan pada tahun lalu, 2,46% PWD yang sebelumnya memiliki pekerjaan mengalami kehilangan pekerjaan karena alasan terkait COVID-19 (Siregar dkk, 2021). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan PWOD di mana 8,43% PWOD yang sebelumnya memiliki pekerjaan mengalami kehilangan pekerjaan karena alasan terkait COVID-19.

Meskipun dampak yang dialami PWOD lebih besar dibandingkan dengan PWD, PWD dianggap masih lebih tidak diuntungkan mengingat mayoritas PWD bekerja di sektor informal dengan kepastian pekerjaan yang terbatas dan juga pilihan untuk memperoleh pekerjaan baru yang terbatas. Pemerintah diberbagai negara meningkatkan daya saing PWD dengan berbagai pelatihan, utamanya untuk meningkatkan keterampilan yang tentu dibutuhkan terutama pada masa krisis. Pemerintah Indonesia tidak terkecuali, meluncurkan Program Kartu Prakerja yang juga terbuka bagi PWD untuk mendaftar dan menerima manfaatnya.

Studi Siregar dkk (2021) juga melakukan estimasi terkait dengan PWD dan Program Kartu Prakerja. Per Agustus 2020, tercatat sebanyak 26,07% penduduk usia produktif Indonesia mengetahui program tersebut. Di kalangan PWD usia produktif, hanya 8,24% yang mengetahui program tersebut hanya 4,35% di antaranya mendaftar untuk program tersebut. Dari populasi penyandang disabilitas yang mendaftar program tersebut, hanya 9,84% yang akhirnya lolos seleksi untuk mengikuti Program Kartu Prakerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 61,98% akan menyelesaikan pelatihan program Kartu Prakerja. Dengan demikian, hanya 0,02% dari populasi PWD yang telah menyelesaikan Program Kartu Prakerja. Dibandingkan dengan penduduk usia produktif PWOD, jumlah yang mendaftar, lolos seleksi, dan menyelesaikan program pelatihan program Kartu Prakerja lebih tinggi dibandingkan dengan populasi PWD. Secara umum, seluruh peserta (100%) Kartu Prakerja dari kelompok PWD dan 88% dari peserta PWOD merasakan bahwa Program Kartu Prakerja meningkatkan keterampilan mereka.

Dengan kondisi pandemi dan kesempatan kerja bagi PWD yang semakin terbatas, perhatian pemerintah pada kelompok masyarakat ini menjadi hal yang sangat krusial. Mengingat bahwa sejalan dengan agenda SDGs yang mengusung pesan *no one left behind*, pembangunan ekonomi yang inklusif bisa dimulai dengan memperluas pasar tenaga kerja untuk PWD dan peningkatan daya saing PWD. Momentum Presidensi 2022

Hanya 0,02% dari populasi PWD yang telah menyelesaikan Program Kartu Prakerja. Secara umum, peserta merasakan manfaat dari Program Kartu Prakerja.

menjadi salah satu pintu yang strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam isu ini.

Referensi:

<https://sherpag20indonesia.ekon.go.id/public/ewg#>

Kementerian Tenaga Kerja. 2021. Ketenagakerjaan dalam Angka. https://satudata.kemnaker.go.id/files/Buku%20Kementerian%20Dalam%20Data%202021%20Buat%20Web_1617259878.pdf

Siregar, Atiqah Amanda, Faizal Rahmanto Moeis, Wildan Al Kautsar Anky. 2021. Assessing Indonesia's Inclusive Employment Opportunities for People with Disability in the COVID-19 Era. LPEM-FEB UI Working Paper 063, August 2021.

WHO & World Bank. (2011). World report on disability 2011. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241564182>.

